



PEDOMAN PENGISIAN PELAPORAN PENGELOLAAN JDIH MELALUI APLIKASI E- REPORT

Pusat JDIHN



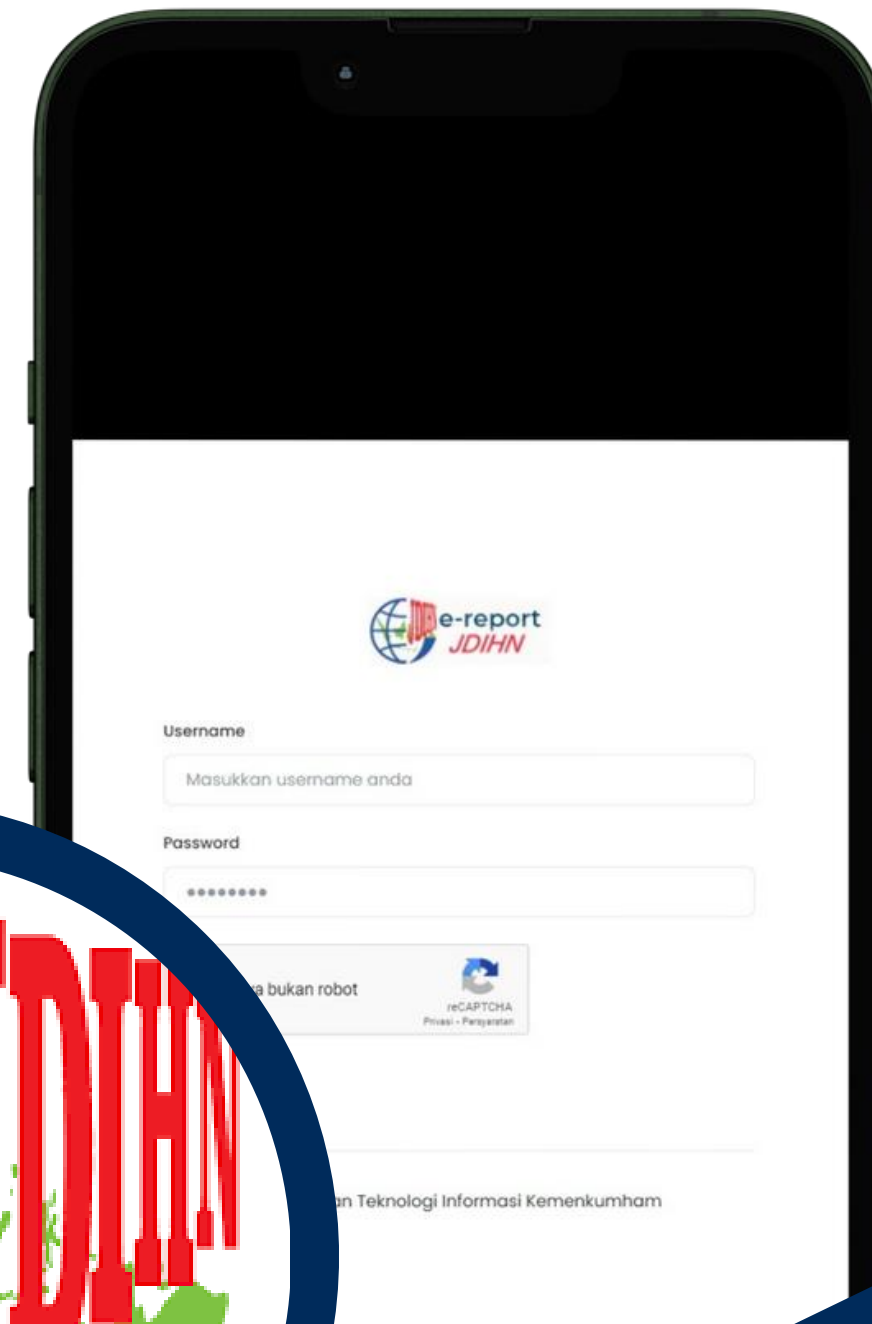
<https://e-report.jdihn.go.id/>

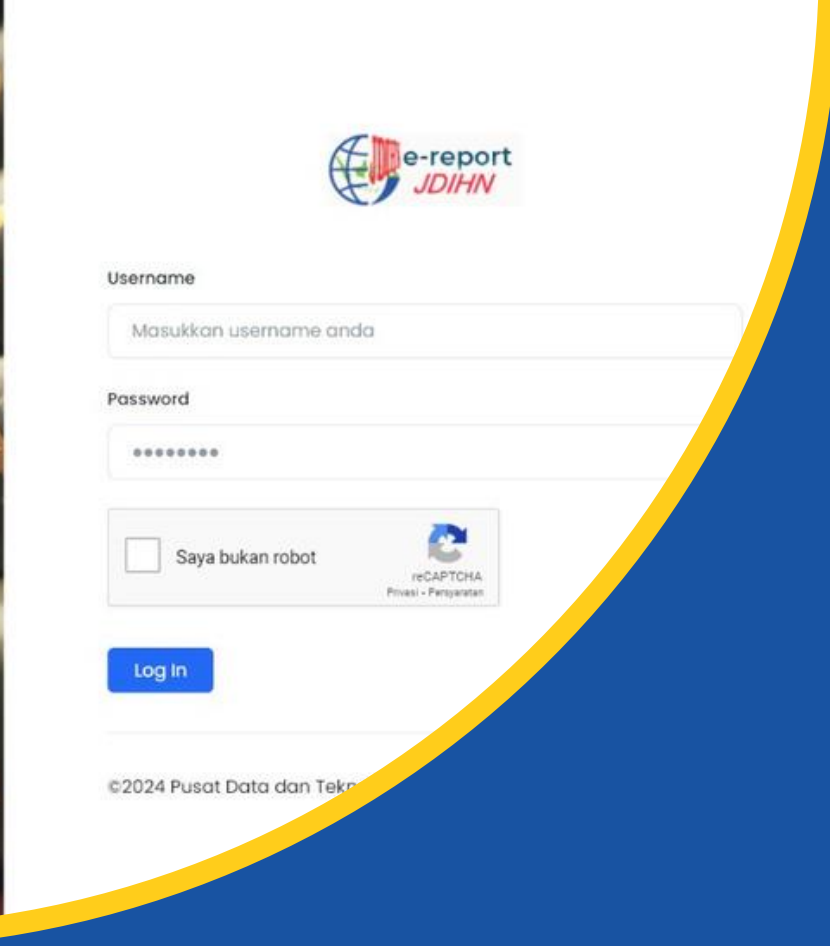


Pengisian Pelaporan Pengelolaan JDIH

Menurut pasal 10 ayat 2 huruf f Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, setiap anggota JDIHN diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN

 <https://e-report.jdihn.go.id/>





login e-Report JDIHN



Pada browser akses ke alamat website
<https://e-report.jdihn.go.id/>



isikan Username dan Password



Username sesuai dengan nama instansi JDIH



Password default “eR3p0rt2024”

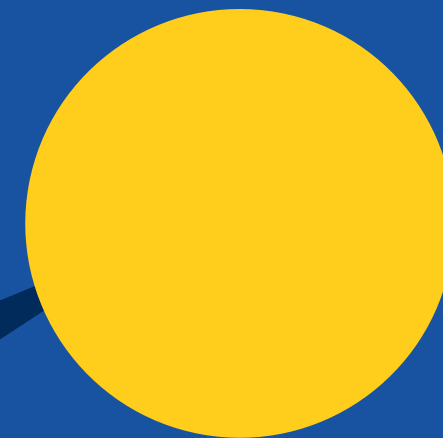


Contoh :

Nama Wilayah/Instansi

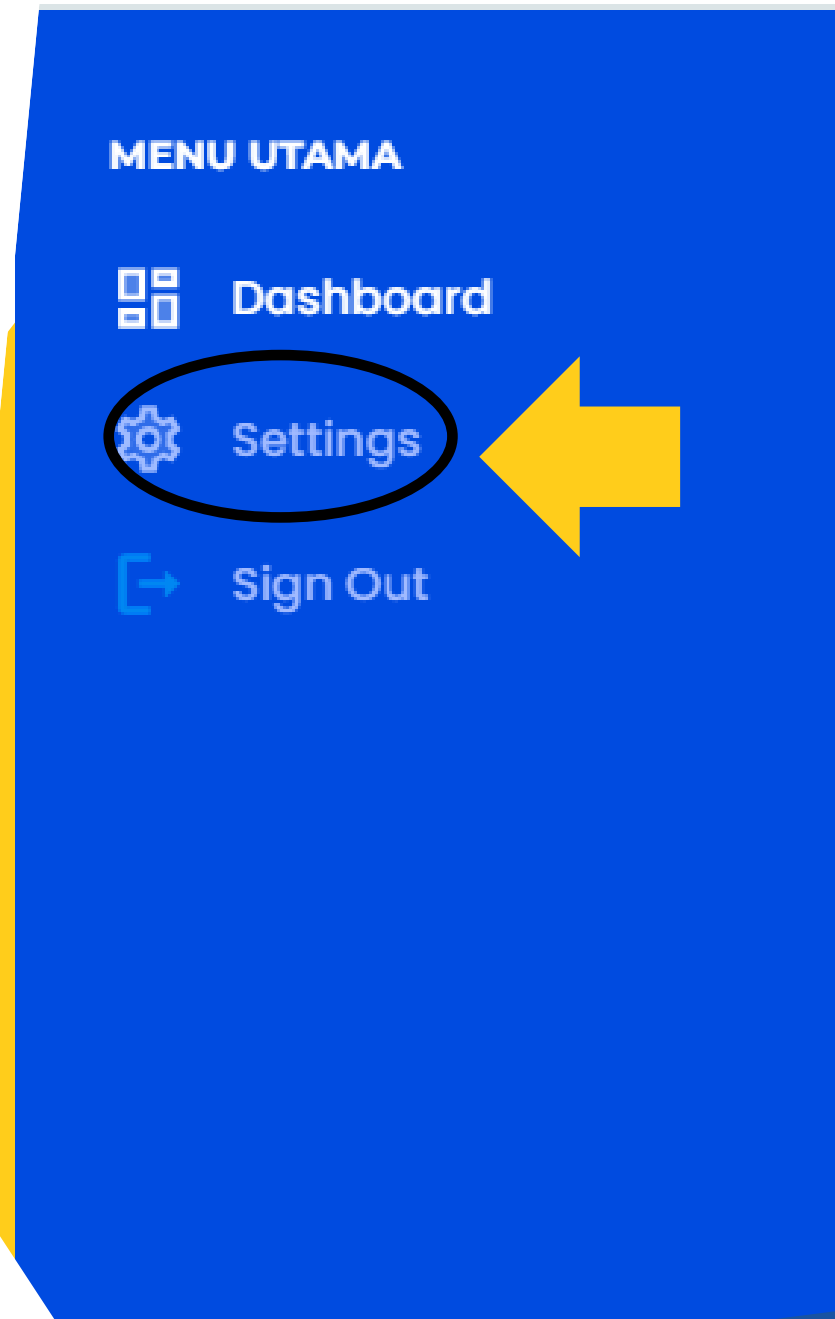
Username : Kantor Wilayah DKI Jakarta

Username : Kementerian Keuangan



<https://e-report.jdihn.go.id/>

Edit data instansi pada e-Report JDIHN



Instansi Keamanan

Nama Instansi

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tingkat

Unit Eselon I Kemenkumham

DKI JAKARTA

Alamat

Telp

0218091908

URL Website Instansi

bphn.go.id

Update Data

✓ masuk menu setting

✓ klik instansi

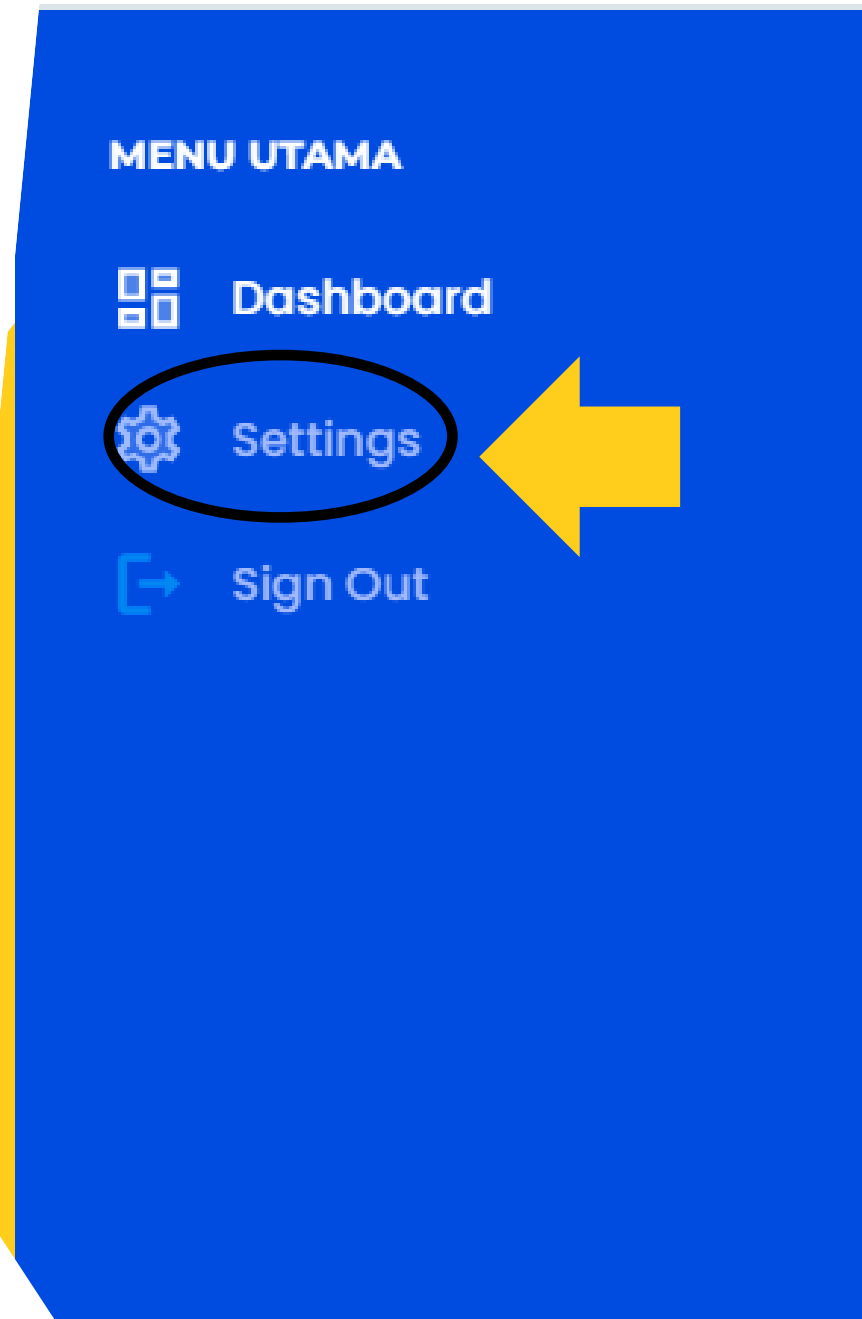
✓ edit data profil instansi

1. alamat
- 2.tlp, email
- 3.Url web instansi
- 4.Url web JDIH

✓ klik update Password



Mengganti Password pada e-Report JDIHN



Instansi Keamanan

Current Password

.....

Masukkan password anda saat ini.

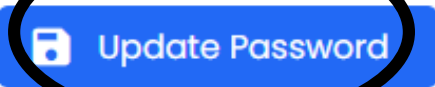
New Password

.....

Password minimal 8 karakter dan mengandung huruf besar, huruf kecil dan angka.

Confirm Password

.....

 Update Password

Draft. Silahkan un



Pengisian data e-Report

START
HERE



Anda belum membuat draft pelaporan pada tahun ini. Silahkan klik tombol untuk membuat draft pelaporan.

Buat Draft Pelaporan



Data Pelaporan

Show 10 entries

Search:

No^{↑↓}

Tahun
Pelaporan^{↑↓}

Status Terakhir^{↑↓}

Hasil Penilaian^{↑↓}

No data available in table

untuk
memulai
pengisian
data ereport
pilih “Buat
Draft
Pelaporan”



Field isian data e-Report

Aspek Organisasi

Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Teknis Pengelolaan

Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH

Permasalahan dan Kendala

Saran



1. organisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Koleksi Dokumen Hukum
4. Teknis Pengelolaan
5. Sarana Prasarana
6. Pemanfaatan TIK
7. Pengembangan JDIH
8. Permasalahan dan Kendala
9. Saran

Pengisian e-Report JDIHN berdasarkan Permenkumham 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum meliputi :

1. Organisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Koleksi Dokumen Hukum
4. Teknis Pengolahan
5. Sarana Prasarana
6. Pemanfaatan TIK
7. Kegiatan Pengelolaan JDIH
8. Permasalahan dan Kendala



<https://e-report.jdihn.go.id/>



Pengisian e-Report - Organisasi

Aspek Organisasi

Sumber Daya Manusia

Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Teknis Pengelolaan

Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH

Permasalahan dan Kendala

Saran

Pilih “Aspek Organisasi”
Kemudian lakukan pengisian

Notes

Anda dapat menggunakan halaman Pengaturan Instansi untuk mengedit data yang dikunci pada Aspek Organisasi. Klik [disini](#) untuk menuju ke halaman Pengaturan Instansi.

Nama Institusi

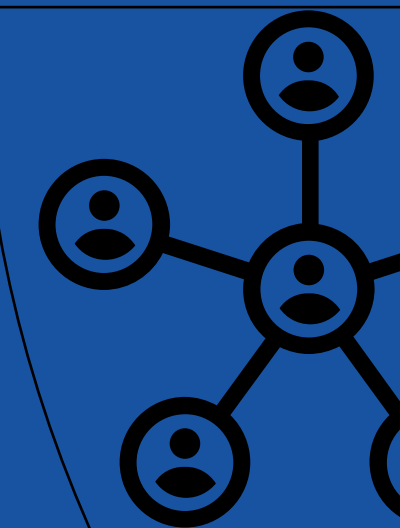
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Nomenklatur JDIH

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tingkat Anggota

Unit Eselon I Kemenkumham



Pengisian e-Report - Organisasi

Isian laporan berkaitan dengan :

- Nomenklatur JDIH
- Kode Pos
- Jumlah anggota JDIH di wilayahnya
- Jumlah UPT/OPD
- Tahun Berdiri
- Tahun Integrasi
- Dasar Hukum JDIH
- Struktur Organisasi JDIH
- SK Tim Teknis JDIH terbaru

Upload Dokumen :

- Upload Dokumen Dasar Hukum Pembentukan JDIH (Permen, PerBan, Pergub, Perbup, Perwal)
- Upload Dokumen SK Tim Pengelola JDIH (Kepmen, KepGub, KepBup, Kepwal)
- Upload bagan Struktur Organisasi JDIH berdasarkan dasar hukum dan /atau SK Tim
- Jenis dokumen untuk unggah bukti : **PDF**
- batasan ukuran dokumen unggah maksimal **5 MB**



Contoh Bukti Dukung



**BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi.

Dasar Hukum



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :188/783/KEP/429.011/2022

TENTANG

TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

SK Tim



<https://e-report.jdihn.go.id/>



Contoh Bukti Dukung



Struktur Organisasi berdasarkan Permenkumham nomor 30 tahun 2013



<https://e-report.jdihn.go.id/>



Pengisian e-Report - Sumber Daya Manusia

Aspek Organ

Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Teknis Pengelolaan

Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH

Permasalahan dan Kendala

Saran

- Pilih “Aspek Sumber Daya Manusia” kemudian pada bagian bawah kiri klik “+tambah data SDM” kemudian lakukan pengisian
- untuk penambahan Data SDM lebih dari satu, klik kembali “+ tambah Data SDM” kemudian lakukan pengisian



ANGGARAN JDIH TAHUN INI

0

Ubah

untuk menambahkan Anggaran JDIH
klik “ubah” kemudian lakukan
pengisian

+ Tambah Data SDM

Pengisian e-Report - Sumber Daya Manusia

Riwayat Pelatihan

+ Tambah Data SDM

1.
Nama : Faizal Yusuf
Jabatan : Analis Hukum



Riwayat Pelatihan

No	Nama Pelatihan	Tanggal
Tidak ada data pelatihan.		

+ Tambah Pelatihan

- setelah melakukan pengisian "Data SDM", untuk mengisi riwayat pelatihan klik "tanda panah" pada bagian kanan lalu klik "+Tambah Pelatihan" kemudian lakukan pengisian
- Untuk penambahan data Riwayat Pelatihan pengelola JDIH lebih dari satu, klik Kembali "+pelatihan" kemudian lakukan pengisian





Pengisian e-Report - Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Organisasi

Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Teknis Pengelolaan

Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Layout: Tab Atas

Layout: Tab Sampling

Pengembangan JDIH

Permasalahan dan Kendala

Saran

+ Tambah Data Jenis PUU

Pilih Koleksi
"Dokumen Hukum"
kemudian lakukan
pengisian sesuai
dengan jenis
dokumen

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Keterangan Jumlah			Bukti Dokumen
		Jumlah PUU Fisik/Hardcopy (yang dikelola secara manual)	Jumlah PUU Otomasi di Website JDIH (yang sudah diupload di website)	Jumlah PUU Yang Sudah Terintegrasi di Website JDIHN (yang sudah ada di website JDIHN.GO.ID)	
Tidak ada data					



<https://e-report.jdihn.go.id/>



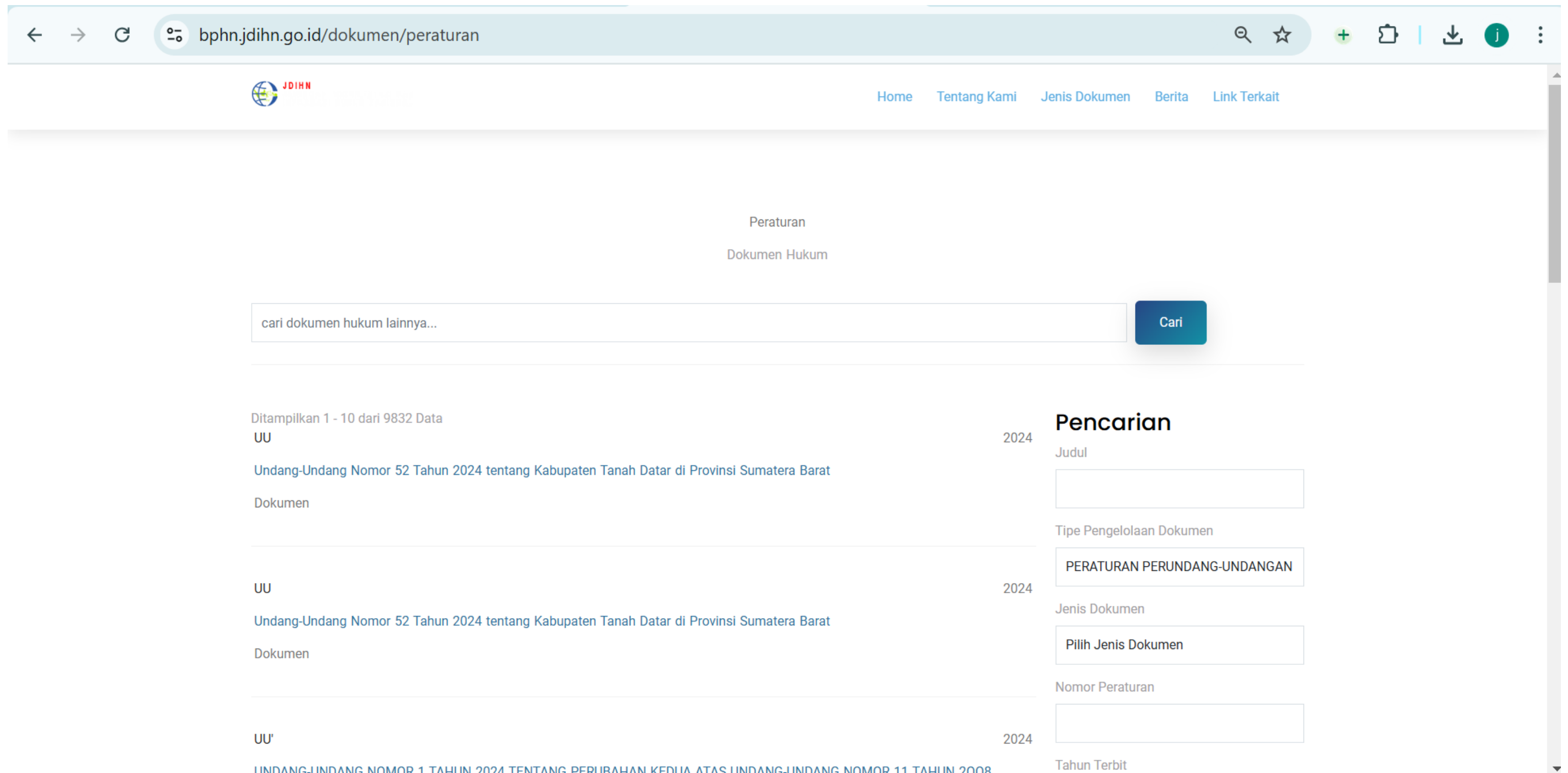
Isian Koleksi Dokumen Hukum berkaitan dengan :

- Peraturan Perundang-undangan;
- Monografi;
- Artikel;
- Putusan;
- Koleksi Dokumen Hukum Langka/Lainnya; dan
- Peraturan Perundang-undangan Terjemahan

Upload Dokumen :

- Screenshot tipe Peraturan, monografi, artikel, putusan, dokumen hukum lainnya dan list Peraturan terjemahan di website JDIH
- Jenis Dokumen PDF
- batasan ukuran dokumen unggah maksimal **5 MB**

Contoh bukti dokumen



The screenshot shows a web browser at the URL bphn.jdihn.go.id/dokumen/peraturan. The page features a navigation bar with links: Home, Tentang Kami, Jenis Dokumen, Berita, and Link Terkait. Below the navigation bar, there are filters for "Peraturan" and "Dokumen Hukum". A search bar contains the text "cari dokumen hukum lainnya..." and a "Cari" button. The main content area displays a list of documents, with the first entry being "Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat". To the right of the document list is a "Pencarian" (Search) sidebar with filters for "Judul", "Tipe Pengelolaan Dokumen" (set to "PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"), "Jenis Dokumen" (set to "Pilih Jenis Dokumen"), "Nomor Peraturan", and "Tahun Terbit" (set to "2024").

<https://bphn.jdihn.go.id/dokumen/peraturan>



Pengisian e-Report - Teknis Pengelolaan

Aspek Organisasi

Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Teknis Pengelolaan

Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH

Permasalahan dan Kendala

Saran

SOP pengelolaan JDIH		Bukti Dokumen: Pilih File Tidak ada file yang dipilih
Kesesuaian metadata PUU dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)		Bukti Dokumen: Pilih File Tidak ada file yang dipilih
Kesesuaian metadata Monografi dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)		Bukti Dokumen: Pilih File Tidak ada file yang dipilih
Kesesuaian metadata Artikel dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)		Bukti Dokumen: Pilih File Tidak ada file yang dipilih
Kesesuaian metadata Putusan dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)		Bukti Dokumen: Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Pilih “Teknis Pengelolaan” kemudian lakukan pengisian berdasarkan dengan pengelolaan JDIH Setelah itu, klik tombol “Update Data” untuk menyimpan.



<https://e-report.jdihn.go.id/>



Isian Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum berkaitan dengan :

- SOP Pengelolaan JDIH;
- Kesesuaian Pengisian Metadata untuk Peraturan Perundang-undangan, Monografi, Artikel dan Putusan
- Abstrak Dokumen Hukum

Upload Dokumen :

- upload SOP pengelolaan JDIH
- Screenshot detail dari metadata website JDIH
- list peraturan yang sudah diabstrak
- Jenis Dokumen PDF
- batasan ukuran dokumen unggah maksimal **5 MB**

Isian Teknis Pengelolaan Dokumen Hukum berkaitan dengan :

- SOP Pengelolaan JDIH;
- Kesesuaian Pengisian Metadata untuk Peraturan Perundang-undangan, Monografi, Artikel dan Putusan
- Abstrak Dokumen Hukum

Upload Dokumen :

- upload SOP pengelolaan JDIH
- Screenshot detail dari metadata website JDIH
- list peraturan yang sudah diabstrak
- Jenis Dokumen PDF
- batasan ukuran dokumen unggah maksimal **5 MB**

Contoh bukti dokumen

 KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM	NOMOR SOP	: 85/1.4/DI.03/12/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Desember 2022
	TGL. REVISI	: 12 Desember 2022
	TGL. EFEKTIF	: 13 Desember 2022
	DISAHKAN OLEH	Plt. Kepala Biro Hukum  <u>Evi Flamboyan Minanda</u> NIP. 198102182006042002
NAMA SOP		Mekanisme Pengungkapan Peraturan Menteri Sosial
DASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Sosial; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar		KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produk hukum 2. Memahami pengelolaan website jdih.kemensos.go.id 3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan pengelolaan arsip digital

SOP

Contoh bukti dokumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

Nomor 4	Tahun 2024
Tempat Terbit Jakarta	Tanggal Penetapan 02 Juli 2024
Tanggal Pengundangan 2024-07-02	Sumber LN 2024 (98): 24 hlm. TLN 6923: 12 hlm.
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Bidang Hukum Hukum Administrasi Negara
Bahasa Indonesia	Lokasi
Pemrakarsa	Penandatanganan JOKO WIDODO

Peraturan Terkait
UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) TAHUN 1945 DAN AMANDEMEN

Dokumen Terkait
Data belum Tersedia

Hasil Uji Materi
Data belum Tersedia

T.E.U BADAN

Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang
Indonesia	Badan Organisasi	Pengarang Utama

SUBJEK : KESEJAHTERAAN IBUDAN ANAK – UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN -

JENIS DOKUMEN
UNDANG-UNDANG
SINGKATAN JENIS
UU
STATUS
Berlaku

Lampiran

2024uu004.pdf
AB2024uu004.pdf

Keterangan Status

Standar Metadata dan Pengisian Metadata



Contoh bukti dokumen

Abstrak

IBU DAN ANAK – HAK KESEJAHTERAAN

2024

UU NO.4, LN 2024/NO.98, 24 HLM. TLN NO. 6923, 12 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

ABSTRAK : - Kesejahteraan ibu dan anak perlu ditingkatkan untuk mewujudkan sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan. Karenanya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak, khususnya pada fase seribu hari pertama kehidupan perlu dikuatkan dengan undang-undang yang khusus mengatur kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan;

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, 21, 28A, 28B ayat (2), 28C ayat (1), 28D ayat (2), 28H ayat (1), dan 29 UUD 1945;

- Undang-Undang ini mengatur tentang Kesejahteraan ibu dan anak utamanya pada fase seribu hari pertama kehidupan melalui pelaksanaan penyelenggaraan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak secara yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pendekatan siklus hidup. Dalam pemenuhan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak pemerintah pusat dan daerah menyediakan: pelayanan kesehatan dan gizi; pelayanan keluarga berencana; pemberian layanan kesejahteraan sosial; pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; penyediaan layanan keagamaan dan bimbingan perkawinan dan keluarga; pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana; pemberian kesempatan mendapatkan pengetahuan edukasi, dan pendampingan; penciptaan lingkungan yang ramah Ibu dan Anak serta pemberian layanan perlindungan; dan /atau pemberian kemudahan layanan hukum dengan memperhatikan keluarga tidak mampu, kerentan khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemberian layanan cuma-cuma sebagaimana yang diatur dalam UU ini. Mengatur pelibatan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak. Mengatur pembinaan, pengawasan dan evaluasi, koordinasi, data dan informasi, sanksi dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 2 Juli 2024;
2. Pengelolaan data dan informasi kesejahteraan ibu dan anak diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah;
3. Penyesuaian peraturan perundang-undangan di bidang ASN, TNI dan Polri sesuai dengan UU ini paling lambat 2 Tahun sejak UU ini diundangkan;
4. Peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak UU ini diundangkan;
5. Pemerintah pusat melaporkan Pelaksanaan UU kepada DPR paling lambat 3 tahun sejak UU ini diundangkan;
6. Penjelasan 12 hlm.

<https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/AB2024uu004.pdf>



<https://e-report.jdihn.go.id/>



Pengisian e-Report - Sarana Prasarana

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan **Aspek Sarana Prasarana**
 Aspek Pemanfaatan TIK
 Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran

Komputer (Laptop/PC)

Printer

Scanner

Jaringan Internet

Server

Memiliki Ruang Perpustakaan Hukum

Bukti Dokumen:

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Link Video:

Memiliki Ruang Kerja

Bukti Dokumen:

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Link Video:

Memiliki Ruang Informasi Hukum

Bukti Dokumen:

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Link Video:

 Update Data

 Update Data

Berikan dokumentasi Perpustakaan Hukum atau Ruang Layanan Informasi Hukum dari berbagai sudut yang dapat menjelaskan posisi dan tata letak secara jelas

Pilih “Sarana Prasarana” kemudian lakukan pengisian berdasarkan dengan pengelolaan JDIH Setelah itu, klik tombol “Update Data” untuk menyimpan.”

Pengisian e-Report - Sarana Prasarana

Isian Sarana Prasarana meliputi :

- Memiliki ruang Perpustakaan Hukum
- Memiliki ruang kerja;
- Memiliki ruang informasi hukum;
- Alat Pengelola Data :
(Komputer/Laptop, Scanner, Jaringan Internet dan Server)

Upload Dokumen :

- Foto ruangan perpustakaan, ruang informasi dan ruang kerja
- foto alat pengolah data
- Jenis Dokumen PDF
- batasan ukuran dokumen unggah maksimal **5 MB**

Contoh bukti dokumen



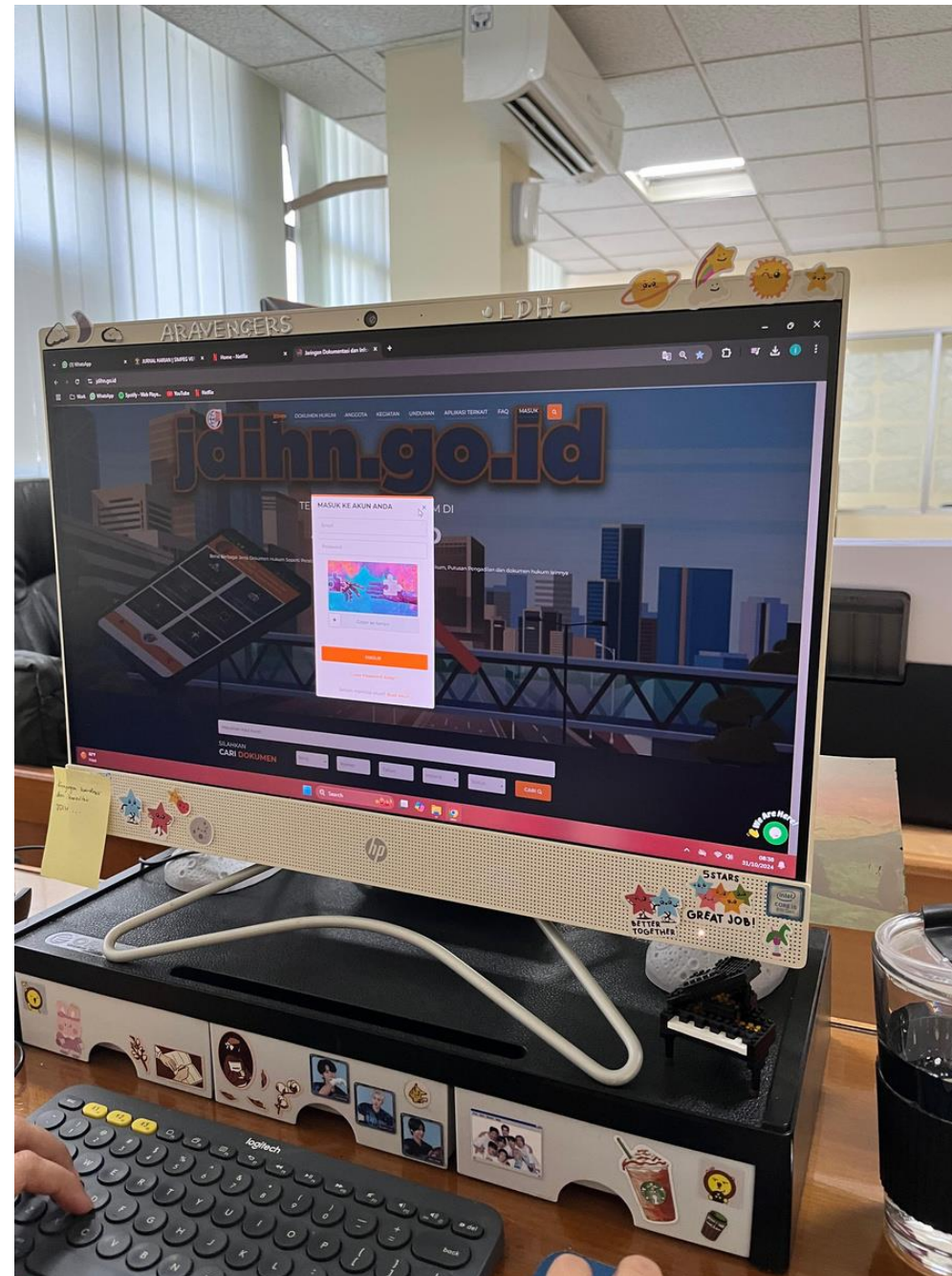
Perpustakaan

Ruang Informasi Hukum

Contoh bukti dokumen



Scanner



Scanner



Printer

Pengisian e-Report - Pemanfaatan TIK

Aspek Organisasi

Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Teknis Pengelolaan

Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH

Permasalahan dan Kendala

Saran

Website Aktif	Belum
Website JDIH sudah terintegrasi secara mandiri, URL API integrasi aktif, dan log sync terupdate.	Belum
Memuat Logo JDIHN di pojok kiri atas Website JDIH	Sudah
Memiliki Fitur Advance Search	Sudah
Memiliki Kuesioner Survey Kepuasan Pengunjung terhadap pemanfaatan Website JDIH	Sudah

Pilih “Pemanfaatan TIK” kemudian lakukan pengisian berdasarkan dengan pengelolaan JDIH Setelah itu, klik tombol “Update Data” untuk menyimpan.

Pengisian e-Report - Pemanfaatan TIK

Isian Pemanfaatan TIK meliputi :

- Website aktif;
- Sudah terintegrasi, URL API aktif dan Log Sync terupdate;
- Logo JDIHN
- Fitur Advance Search;
- Survei Kepuasan Pengunjung;
- Hyperlink ke jdihn.go.id
- hyperlink dari web utama ke JDIH

Upload Dokumen :

- Screenshot website JDIH
- Screenshot API dan Log Sync
- Screenshot logo, fitur advance search, IKM, hyperlink yang ada di website
- Jenis Dokumen PDF
- batasan ukuran dokumen unggah maksimal **5 MB**



Pengisian e-Report - Pemanfaatan TIK

Isian Pemanfaatan TIK meliputi :

- Website JDIH dilengkapi dengan sistem keamanan Pentest atau SSL;
- memiliki aplikasi berbasis mobile;
- Penggunaan Kios Informasi Elektronik;
- Pengembangan aplikasi yang mendukung pemanfaatan JDIH

Upload Dokumen :

- Surat dari BSSN atau dari penyedia pentest
- Screenshot APK mobile dari playstor atau Appstore
- Foto KIOSK
- Screenshot website JDIH sebelum dan sesudah pengembangan
- Jenis Dokumen PDF
- batasan ukuran dokumen unggah maksimal **5 MB**



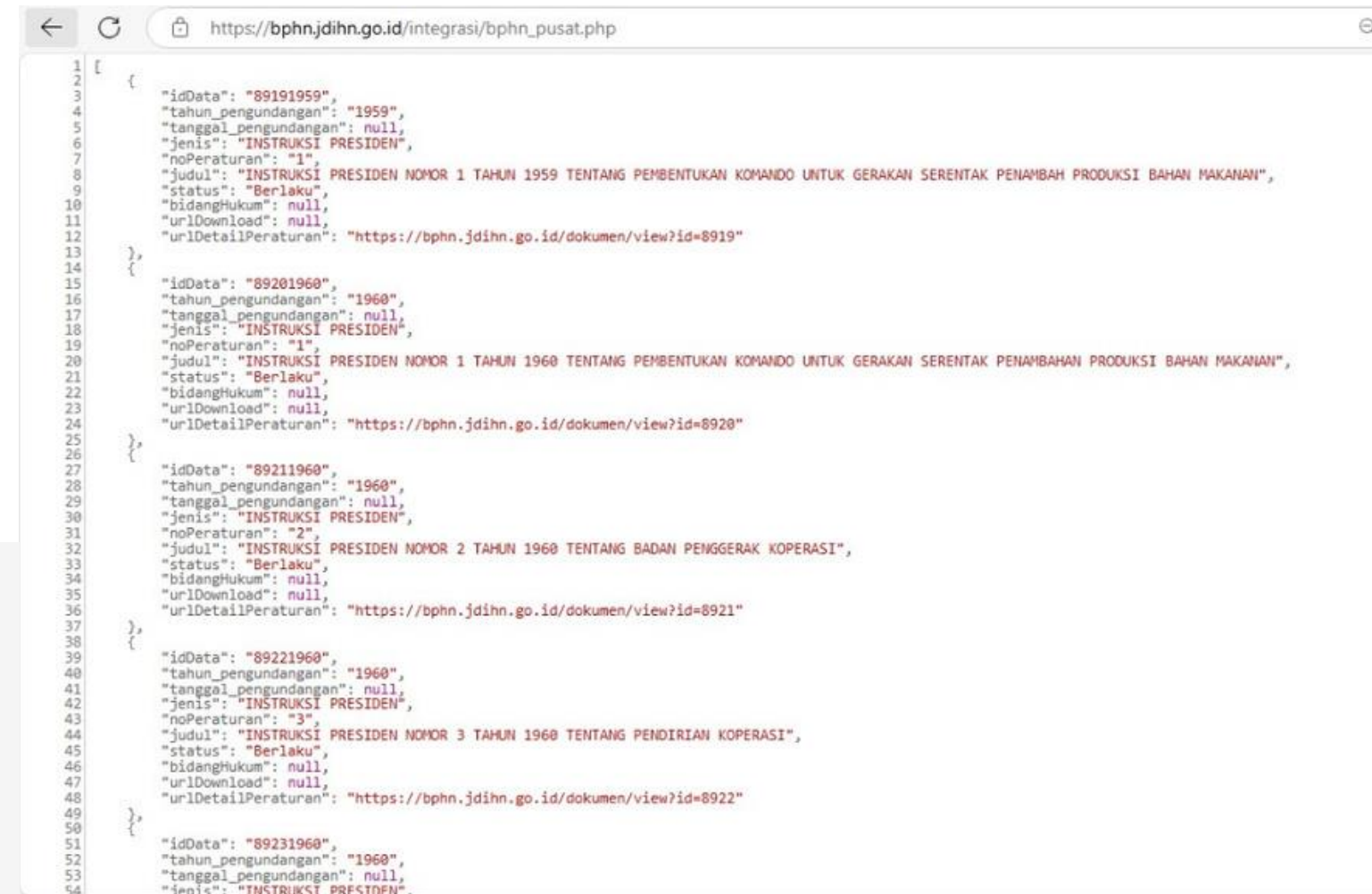
Contoh bukti dokumen



website aktif

Nomor	Tanggal	Sync	Data	API	Keterangan
1	October 22, 2024 11:41 AM	Sukses Sync	362	https://bphn.jdihn.go.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php	Sukses dengan 362 data.
2	October 22, 2024 10:13 AM	Proses Sync	0	https://bphn.jdihn.go.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php	Sync sedang di proses, silahkan melakukan pengecekan berkala pada akun JDIHN
3	October 1, 2024 1:13 PM	Sukses Sync	345	https://bphn.jdihn.go.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php	Sukses dengan 345 data.
4	October 1, 2024 11:57 AM	Proses Sync	0	https://bphn.jdihn.go.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php	Sync sedang di proses, silahkan melakukan pengecekan berkala pada akun JDIHN
5	September 3, 2024 6:13 PM	Sukses Sync	10000	https://bphn.jdihn.go.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php	Sukses dengan 10000 data.
6	September 3, 2024 10:59 AM	Proses Sync	0	https://bphn.jdihn.go.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php	Sync sedang di proses, silahkan melakukan pengecekan berkala pada

Log Sync terupdate



API aktif

https://bphn.jdihn.go.id/integrasi/bphn_pusat.php



<https://e-report.jdihn.go.id/>





Contoh bukti dokumen

→ ↻ 📑 bphn.jdihn.go.id

**JDIHN**
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM NASIONAL

Home Tentang Kami

Logo JDIHN

📄 🔍 ☆ + 📁 | ⬇️ ⓘ

Home Tentang Kami Jenis Dokumen Berita Link Terkait

Indeks Kepuasan Masyarakat

Mohon mengisi survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai masukan untuk penyajian website yang lebih baik.

SILAKAN PARTISIPASI SURVEY KAMI

IKM

Home Tentang Kami Jenis Dokumen Berita Link Terkait

Hubungi Kami

JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional

Gedung JDIHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jl. Mayjend Soetoyo No. 10, Cililitan-
Jakarta Timur

(021) 8091908

pih@jdihn.go.id / pih.pusdok@gmail.com

Tautan

Portal Kemenkuham R.I.

Portal BPHN

Portal JDIHN

hyperlink ke JDIHN.GO.ID

2024

Pencarian

Judul

Tipe Pengelolaan Dokumen

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2024

Jenis Dokumen

Pilih Jenis Dokumen

Nomor Peraturan

2024

Tahun Terbit

8

Status

Pilih Status

2024

Subyek

Nama Pengarang

2024

Cari

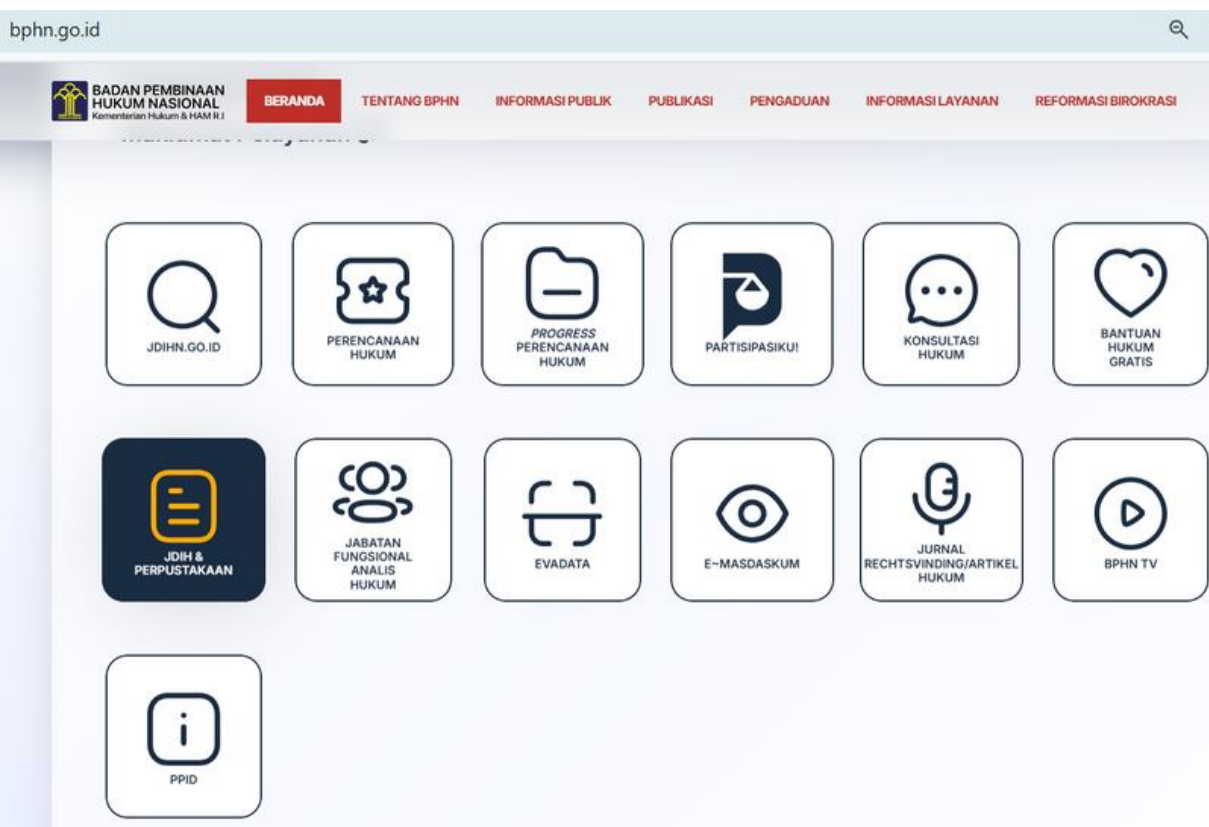
Fitur Advance Search



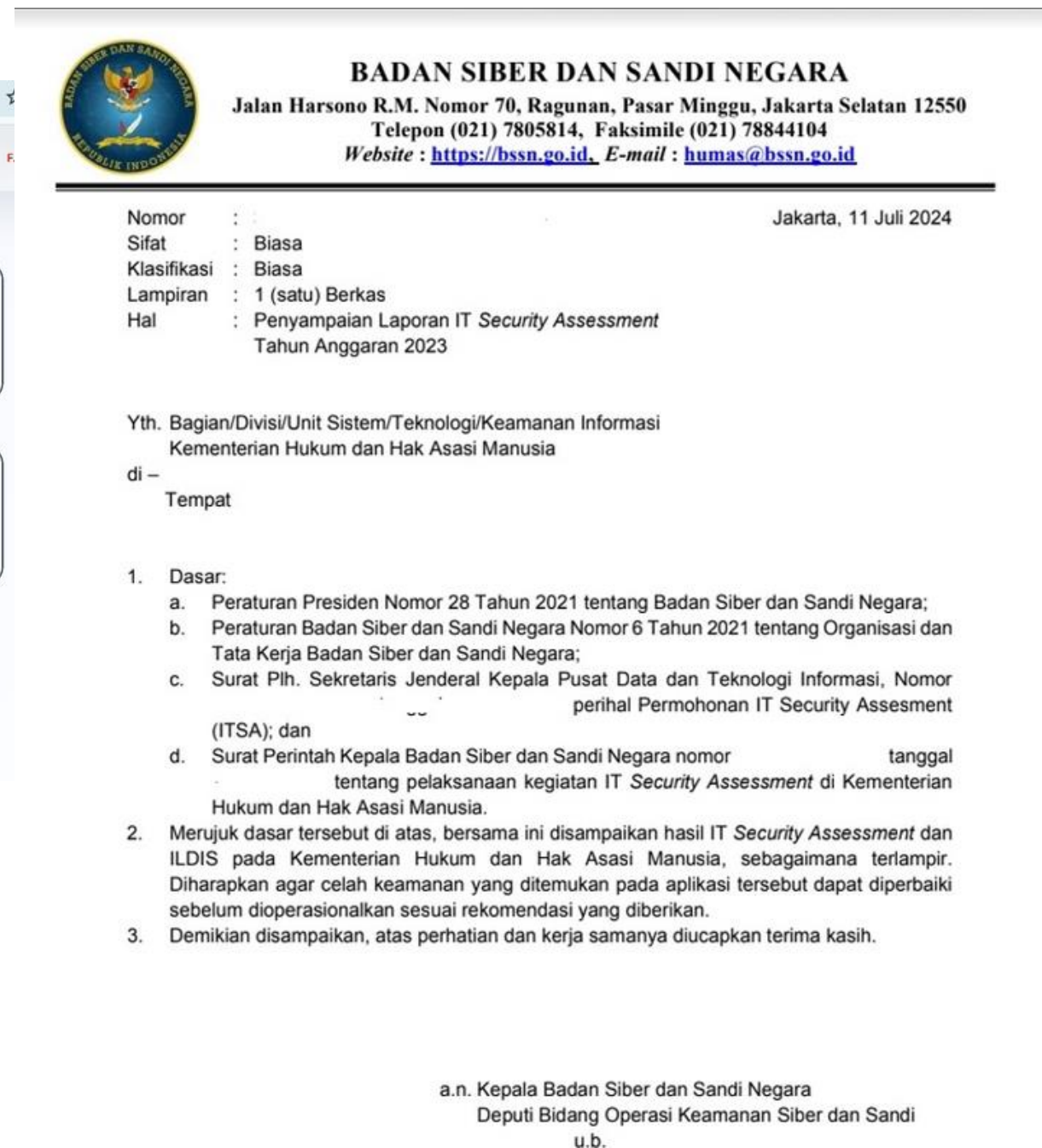
<https://ereport.jdihn.go.id/>



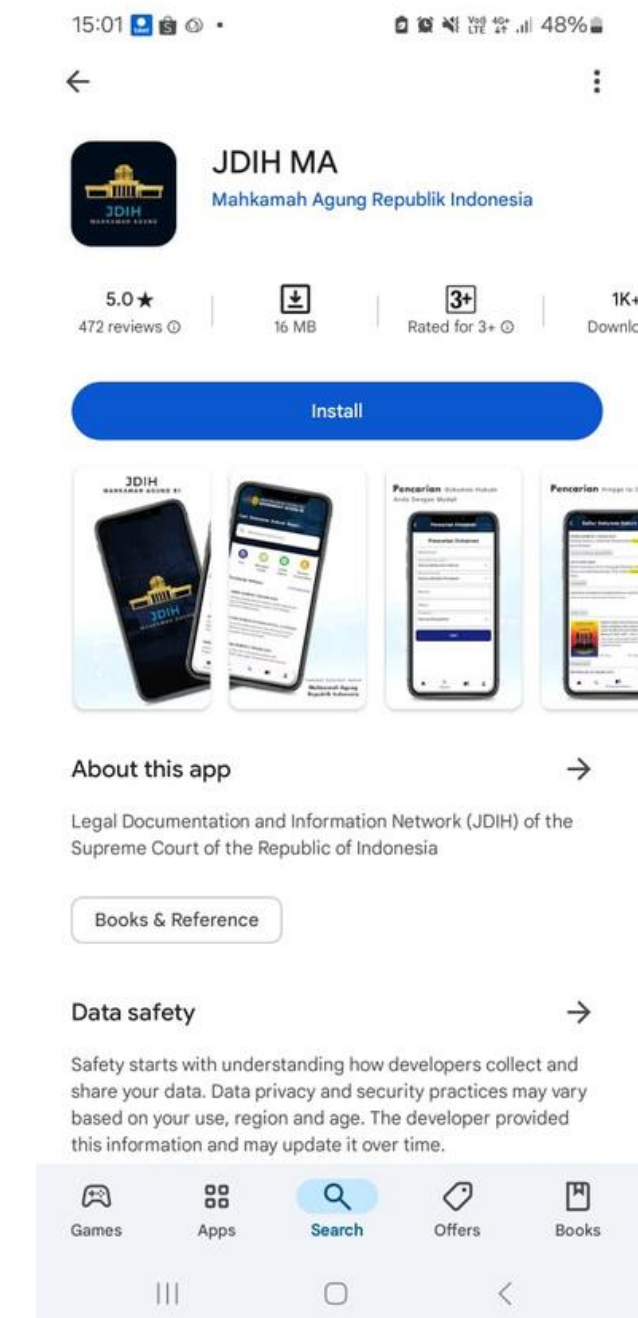
Contoh bukti dokumen



Hyperlink dari web utama ke JDIH



contoh surat dari BSSN (Pantest BSSN)



APK Mobile

Link Playstore <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jdi.h.mobile>
Link App store <https://apps.apple.com/id/app/jdi-h-mahkamah-agung-ri/id6523424925?l=id>



<https://e-report.jdihn.go.id/>



Contoh bukti dukung



Kios Informasi Elektronik



sebelum pengembangan

Sesudah pengembangan



Pengisian e-Report - Pengembangan JDIH

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Layout: Tab Atas

Layout: Tab Samping

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran

Sosialisasi JDIHN Melalui Media Massa dan Media Sosial

Ada

Bukti Dokumen:

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih



Lihat File

Statistik Pengunjung

Tidak

Bukti Dokumen:

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Statistik Dokumen

Ada

Bukti Dokumen:

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih



Lihat File

Update Data

+ Tambah Data Kegiatan/Bimtek

Untuk bagian pelaksanaan kegiatan, harap melampirkan bukti berupa undangan rapat, dokumentasi, daftar absensi, notulen

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat	Tingkat Peserta	File Bukti				
					Dokumentasi	Absensi	Surat Undangan	Notula	
Tidak ada data									

+ Tambah Data Study Banding/Study Tiru

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat	Tingkat Peserta	File Bukti
Tidak ada data					

Pilih “Pengembangan JDIH kemudian lakukan pengisian berdasarkan dengan pengelolaan JDIH. Klik +Tambah pada masing-masing kolom isian Setelah itu, klik tombol “Update Data” untuk menyimpan



Pengisian e-Report - Pengembangan JDIH

Isian Pengembangan JDIH meliputi :

- Sosialisasi melalui media massa/medsos
- Statistik pengunjung
- Statistik dokumen
- Melaksanakan kegiatan Pengolahan JDIH di Tahun Penilaian
- Study banding/koordinasi dalam tahun penilaian
- Inovasi JDIH

Upload Dokumen :

- Screenshot Medsos
- Screenshot statistik pengunjung dan statistik dokumen
- dokumentasi kegiatan, absensi, surat undangan dan notulen
- Jenis Dokumen PDF
- batasan ukuran dokumen unggah maksimal **5 MB**



hukumonline.com/berita/a/kemenkumham-beri-penghargaan-15-kota-dan-kabupaten-pengelola-jdihn-terbaik-lt66c7b090c41ad/

Kemenkumham Beri Penghargaan 15 Kota dan Kabupaten Pengelola JDIHN Terbaik

Terbaru

Bookmark

Share

A

A

Magister Ilmu Hukum

Universitas Gadjah Mada

(Kampus Jakarta)

Penerimaan Mahasiswa Baru

Semester Gasal

TA 2024/2025

Berita Populer

1

Ini Daftar Nama Menteri-Wamen di Kabinet Merah Putih Prabowo-...

2

Advokat Tony Budidjaja Tersandung Kasus Hukum, Ini Duduk Perkaranya

3

Daftar 12 Peristiwa Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

4

Pengusaha Sawit Persoalkan Sanksi Bagi Pemilik Tanah di Kawasan...

5

Segera Daftar! Penghujung Oktober, 3 Perusahaan Buka Lowongan Kerj...

Berita Terbaru

Lihat Semua →

Link Berita <https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenkumham-beripenghargaan-15-kota-dan-kabupaten-pengelola-jdihn-terbaik-lt66c7b090c41ad/>



Sosialisasi melalui media massa
(videotron)



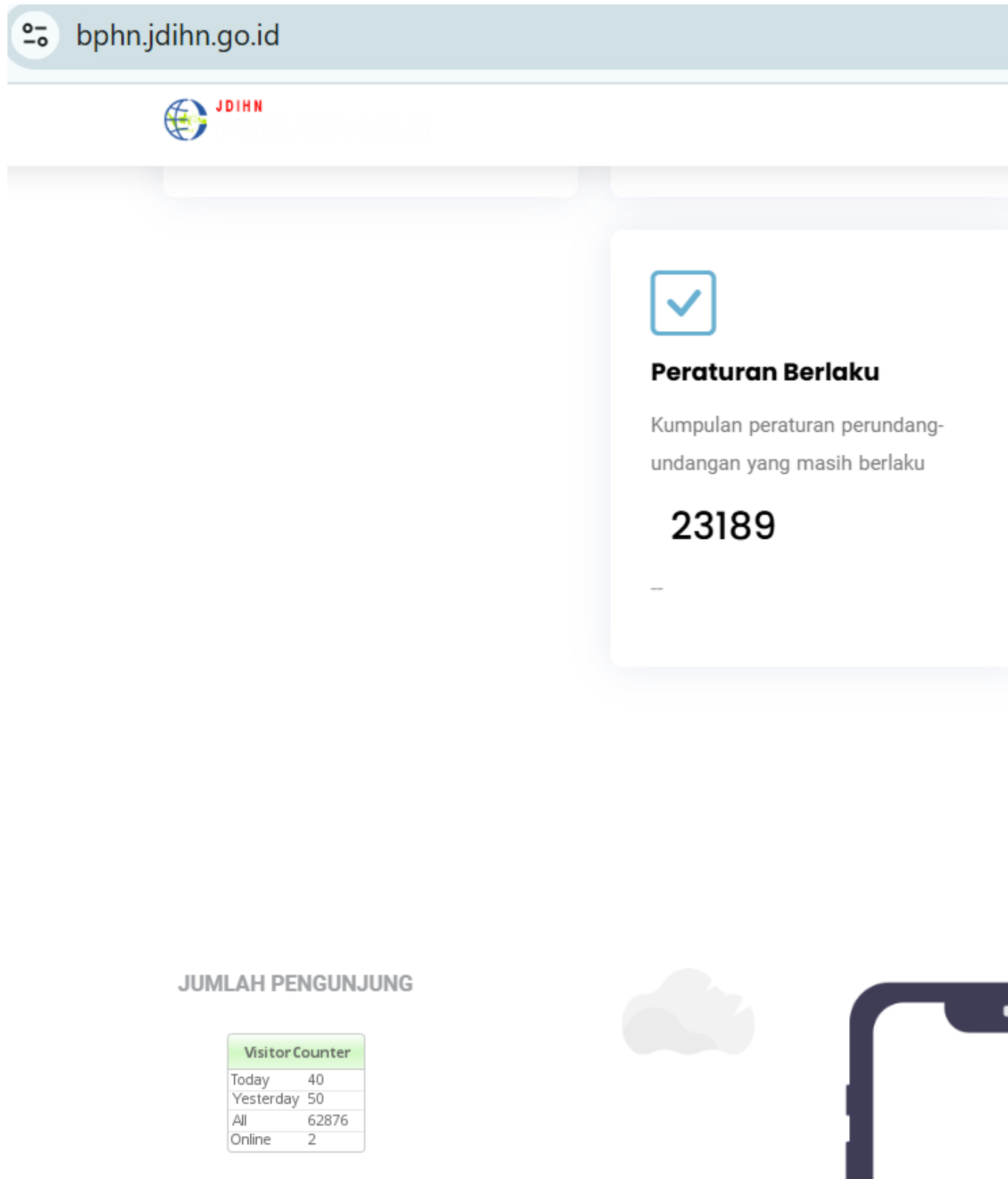
Medsos



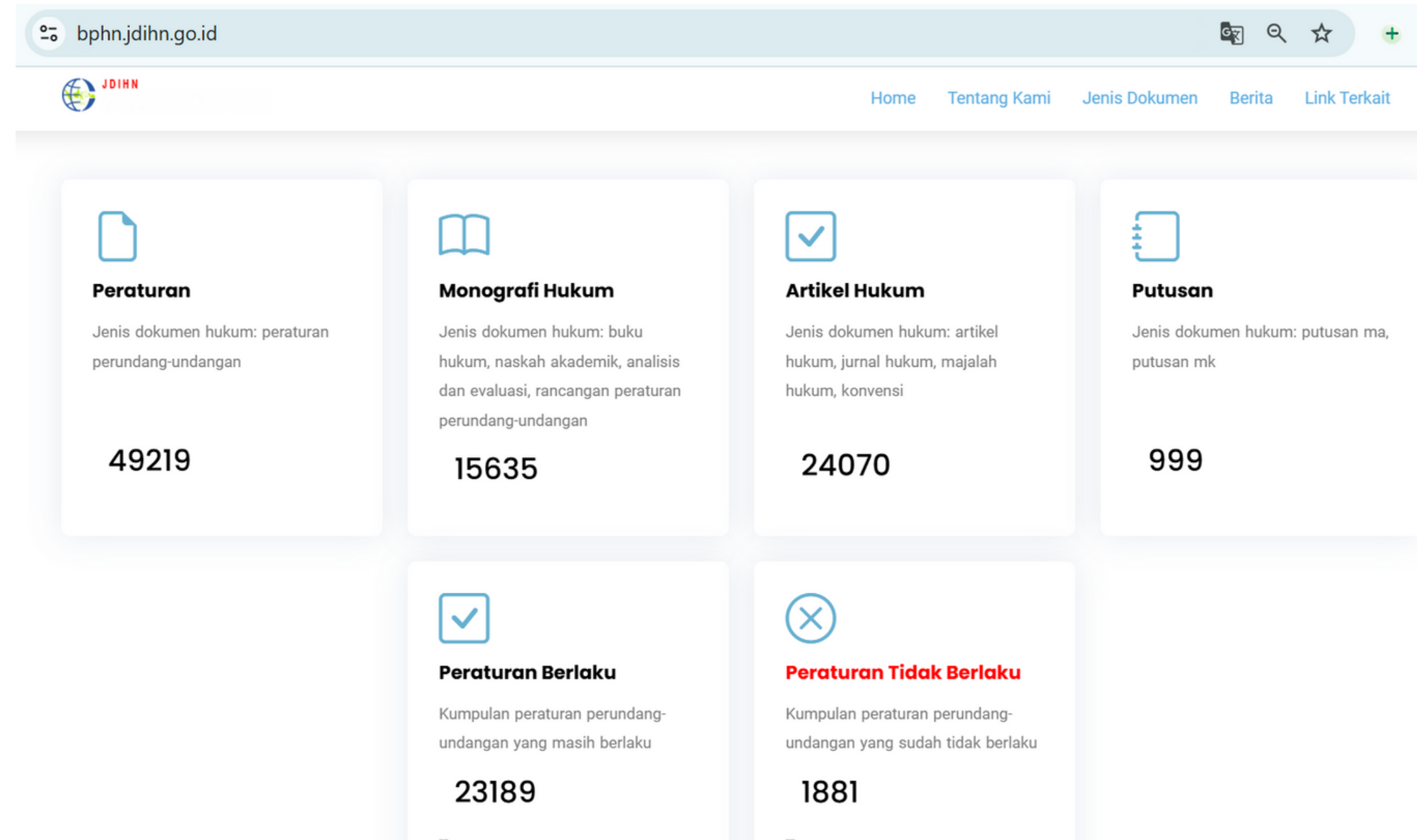
<https://e-report.jdihn.go.id/>



Contoh bukti dokumen



Statistik Pengunjung



Statistik Dokumen

Pengisian e-Report - Permasalahan dan Kendala

Aspek Organisasi

Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Teknis Pengelolaan

Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Layout: Tab Atas

Layout: Tab Samping

Pengembangan JDIH

Permasalahan dan Kendala

Saran

+ Tambah Data Permasalahan/Kendala

No	Jenis Permasalahan/Kendala	Uraian	Upaya Penyelesaian	
Tidak ada data				

Pilih “Permasalahan dan kendala” lakukan pengisian pada kolom “Permasalahan dan Kendala” atas pengelolaan JDIH



Lihat



Log Status



Submit



Pengisian e-Report - Saran

Aspek Organisasi

Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Teknis Pengelolaan

Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH

Permasalahan dan Kendala

Saran

Saran

Pilih “Saran” lakukan pengisian pada kolom “Saran” atas pengelolaan JDIH

Simpan



Pengisian e-Report - Kirim Laporan

[◀ Kembali](#)[i Status: Draft](#)[🕒 Log Status](#)[➤ Submit Laporan](#)[Aspek Organisasi](#)[Aspek Sumber Daya Manusia](#)[Aspek Koleksi Dokumen Hukum](#)[Aspek Teknis Pengelolaan](#)[Aspek Sarana Prasarana](#)[Aspek Pemanfaatan TIK](#)[Pengembangan JDIH](#)[Permasalahan dan Kendala](#)[Saran](#)[Layout: Tab Atas](#)[Layout: Tab Samping](#)

Saran

[Simpan](#)

Setelah pengisian pelaporan selesai dilakukan, klik "Submit Laporan"



Mekanisme Submit Pelaporan Anggota



1. Anggota wajib menggenerate dokumen bukti rekap pelaporan melalui klik pada tombol berikut:

Unduh Bukti Rekap Pelaporan

2. Cetak dokumen bukti rekap pelaporan lalu bubuhkan tanda tangan basah kepala instansi
3. Scan dokumen bukti rekap pelaporan yang telah dibubuhi tanda tangan kepala instansi, lalu unggah pada kolom yang telah disediakan dibawah ini:

Kolom hanya muncul apabila anggota sudah klik tombol unduh dokumen bukti rekap pelaporan

Pilih File

Tidak ada file yang dipilih

Silahkan unduh format surat pernyataan, tanda tangani oleh Pimpinan instansi (kepala Biro/Kepala Bagian), scan, lalu unggah kemudian submit

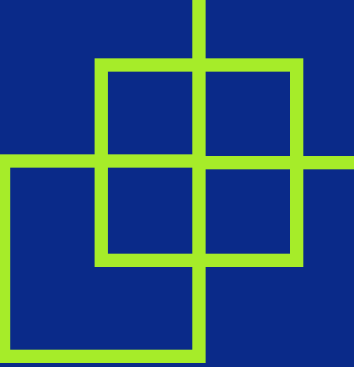
Submit

Close



PERHATIAN!

Apabila diperlukan pengeditan pada pelaporan yang sudah disubmit, harap menyampaikan permohonan secara resmi melalui surat kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional u.p. Kepala pusat JDIHN. Permohonan ini akan digunakan untuk mengembalikan akses akun sehingga pelaporan dapat diperbarui sesuai kebutuhan.



Thank You

JDIHN.GO.ID

 <https://e-report.jdihn.go.id/>

